



## WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 5 NOMOR 2 (NOVEMBER 2024)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

# EVALUASI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN (STUDI TENTANG PENATAAN KOTA DI KOTA TASIKMALAYA)

Ivan Dicksan Hasannudin<sup>a</sup>, Arifah Rosmajudi<sup>b</sup>, Astri Siti Fatimah<sup>c</sup>, Deni Sudrajat<sup>d</sup>, M. Ikrar Budijaya<sup>e</sup>, Tine Badriatin<sup>\*</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> STIA YPPT Priatim, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

<sup>f</sup> Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

[\\*tineubadriatin@unsil.ac.id](mailto:*tineubadriatin@unsil.ac.id)

**Diterima:** Oktober 2024 **Disetujui:** Oktober 2024 **Dipublikasikan:** November 2024

### ABSTRACT

*This research aims to identify gaps in policy implementation and areas that need improvement in urban development in Tasikmalaya City. The methodology used is literature study. This research highlights key aspects such as land use regulation, public participation in planning processes, and the integration of environmental considerations into policy formulation. Despite strategic plans aimed at encouraging sustainable development, studies show that several factors contribute to the ineffectiveness of urban development policies in the City of Tasikmalaya, including inadequate stakeholder engagement, insufficient funding for implementation, and lack of coordination between various government agencies involved in urban planning. The research results show that communities affected by development policies are less involved in the decision-making process, which causes a mismatch between policy objectives and community needs. These gaps not only hinder effective implementation, but also reduce public trust in government.*

**Keywords:** Urban development policy, Planning, Sustainable development, Pedestrian.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek utama seperti regulasi penggunaan lahan, partisipasi publik dalam proses perencanaan, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam formulasi kebijakan. Meskipun terdapat rencana-rencana strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, studi menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakefektifan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai, pendanaan yang tidak mencukupi untuk implementasi, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat implementasi yang efektif, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

**Kata Kunci:** Kebijakan pembangunan perkotaan, Perencanaan, Pembangunan berkelanjutan; Pedestrian.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki tujuan mencakup berbagai macam sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya yaitu pertumbuhan ekonomi, yang sering diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut (Sen, 1999), pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada indikator ekonomi, tetapi juga pada penguatan kemampuan dan kebebasan individu. Pendekatan kemampuannya menekankan bahwa pembangunan sejati adalah tentang memberdayakan orang untuk menjalani kehidupan yang dihargai, termasuk akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Tampubolon, 2020). Perspektif ini mengalihkan fokus dari indikator ekonomi sederhana ke pandangan yang lebih menyeluruh tentang kesejahteraan manusia.

Tujuan penting lainnya dari pembangunan yaitu keadilan sosial, dimana upaya pembangunan harus mengatasi ketimpangan dalam masyarakat, memastikan bahwa kelompok terpinggirkan memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang. Penelitian terkini yang diterbitkan oleh *World Development* menunjukkan bahwa kebijakan inklusif dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan (Klasen & Lamanna, 2009). Misalnya, inisiatif kesetaraan *gender* tidak hanya memberdayakan perempuan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan masyarakat.

Keberlanjutan lingkungan telah menjadi tujuan penting dalam wacana pembangunan kontemporer. Laporan (Brundtland, 1987) memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Penelitian yang diterbitkan dalam *Ecological Economics* menunjukkan bahwa mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dapat menghasilkan ekonomi yang lebih tangguh (Costanza & Turner, 2014). Pendekatan ini

menganjurkan praktik yang meminimalkan degradasi ekologi sekaligus mendorong keadilan sosial dan kelangsungan ekonomi (Modeong, Sunarno, & ND, 2024).

Setiap pembangunan memiliki keterkaitan satu sama lain dan memerlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan perencanaan perkotaan bermacam-macam dan memiliki tujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, adil dan sejahtera (Haghani & dkk, 2023). Menurut para ahli, perencana kota menanggapi kebutuhan masyarakat, menghormati signifikansi budaya, dan mempertimbangkan kemakmuran jangka panjang wilayah perkotaan dan regional (Ferreira, Sykes, & Batey, 2009)

Perencanaan pembangunan melibatkan penyeimbangan berbagai kepentingan yang saling bersaing, pengelolaan pertumbuhan, dan memastikan kota layak huni, tangguh, dan mudah beradaptasi terhadap keadaan yang berubah. Seperti yang dibahas (S, Elrahman, & Asaad, 2021), teori perencanaan kota telah berkembang seiring waktu, dengan pergeseran teoritis besar yang memengaruhi bidang tersebut, seperti konsep perencanaan perkotaan terpadu telah menjadi terkenal, menyoroti perlunya pendekatan menyeluruh yang memperhitungkan sifat kompleks kota dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan layak huni (Milojevic, 2018). Kerangka teoritis dan metode penelitian sangat penting dalam perencanaan perkotaan, karena dapat menginformasikan desain bangunan, ruang publik, dan sistem transportasi (Lehmann, 2023).

Pembangunan perkotaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, fungsional, dan estetis yang meningkatkan kualitas hidup penduduk. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dan layanan (MZ, Wibowo, & Said, 2024). Menurut Bank Dunia, kawasan perkotaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi karena di sanalah sumber daya, tenaga kerja, dan inovasi terkonsentrasi (Bank, 2021). Konsentrasi ini

membantu meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Teori seperti "ekonomi aglomerasi" yang diajukan oleh Alfred Marshall menekankan bahwa perusahaan mendapat manfaat dari kedekatan satu sama lain karena sumber daya bersama dan berkurangnya biaya transportasi. Di Indonesia, inisiatif pembangunan perkotaan sering kali berfokus pada peningkatan konektivitas antara pusat perkotaan dan daerah pedesaan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Tujuan penting lain dari pembangunan perkotaan adalah pemerataan. Perencana kota bekerja untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi umum. Konsep "kota yang adil" yang diutarakan oleh Fainstein yang menyatakan bahwa kota harus dirancang dengan mempertimbangkan kesetaraan, memastikan distribusi sumber daya yang adil (Fainstein, 2010). Penelitian lainnya menyoroti pentingnya proses perencanaan inklusif yang melibatkan masyarakat terpinggirkan dalam pengambilan keputusan (Sari, Prasetyo, & Wibowo, 2022). Pendekatan ini tidak hanya mempromosikan kohesi sosial, tetapi juga memberdayakan penduduk dengan memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan lingkungannya.

Keberlanjutan lingkungan merupakan tujuan utama pembangunan perkotaan. Saat kota berkembang, akan menghadapi tantangan terkait polusi, pengelolaan limbah, dan perubahan iklim. Teori "urbanisme berkelanjutan," yang didukung oleh para ahli seperti Andrés Duany dan Elizabeth Plater-Zyberk, menekankan perancangan kota yang meminimalkan jejak ekologis sekaligus memaksimalkan kualitas hidup (Duany & Plater-Zyberk, 2009). Mengintegrasikan ruang hijau ke dalam perencanaan kota dapat secara signifikan meningkatkan kualitas udara dan kesehatan mental penduduk (Hidayati, Rahmaniar, & Supriyadi, 2023). Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang memprioritaskan pertimbangan lingkungan di samping tujuan ekonomi dan sosial.

Berberapa hasil penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan dalam pembangunan perkotaan diantaranya oleh Ine dan Ajeng (2023) di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari aspek perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat masalah yang belum teratasi, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Kota Bandung, sehingga disarankan agar dilakukan revisi terhadap peraturan ini untuk lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penelitian berikutnya terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan dalam pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan yang dilakukan Gunawan (2022), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan antara kawasan JBBS dan JBBU, dan bahwa tiga framework yang ditawarkan dapat menjadi upaya meminimalisasi masalah tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulastri, dkk. (2022) menunjukan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir masih memiliki kekurangan dan perlu diperbaiki. Dari 12 indikator yang diukur, terdapat dua indikator yang belum memenuhi standar, yaitu kejelasan sasaran penerima program dan jumlah sarana prasarana, sehingga perlu dilakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di kawasan tersebut.

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 menunjukan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan (Iing Zenal Arifin, dkk. 2023).

Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu kota yang berkembang di wilayah Priangan Timur Jawa Barat, menghadapi tantangan dalam

pengelolaan pembangunan perkotaan. Kebijakan pembangunan perkotaan di Tasikmalaya berfokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk penataan pedestrian dan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu aspek penting dari kebijakan pembangunan perkotaan yaitu penataan pedestrian. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengimplementasikan berbagai proyek untuk memperbaiki trotoar, menyediakan jalur pejalan kaki yang aman, dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua warga.

Penataan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki. Dengan adanya jalur pedestrian yang baik, diharapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara di kota. Disamping itu kebijakan terkait PKL juga menjadi fokus utama dalam pembangunan perkotaan di Tasikmalaya. PKL sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga pemerintah berusaha untuk menata lokasi PKL dengan cara yang terencana, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas atau kenyamanan pejalan kaki. Penataan ini meliputi penyediaan tempat khusus bagi PKL serta pengaturan jam operasionalnya. Selain itu, studi oleh Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa penataan PKL yang baik berkontribusi pada peningkatan citra kota dan kepuasan masyarakat terhadap lingkungan perkotaan mereka. Dengan demikian, sinergi antara penataan PKL dan infrastruktur menjadi kunci dalam menciptakan kota yang berkelanjutan dan dinamis. Kebijakan pembangunan perkotaan yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap sosial masyarakat. Dengan adanya penataan pedestrian dan PKL yang teratur, ruang publik menjadi lebih nyaman dan menarik bagi warga. Hal ini mendorong interaksi sosial antarwarga serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan PKL yang tertata rapi dapat menciptakan suasana kota yang lebih hidup dan dinamis, sehingga menarik

pengunjung dari luar daerah. Secara ekonomi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan penataan yang baik, para pedagang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus bersaing dengan kendaraan bermotor atau gangguan lain. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas umum juga akan mendukung pertumbuhan bisnis lokal lainnya.

Kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini belum sesuai dengan yang diharapkan (Perwalkot, 2024). Kebijakan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya belum berhasil menciptakan keseimbangan yang diharapkan, sehingga diperlukan kajian dari adanya kebijakan penataan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kebijakan penataan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan ini juga belum berhasil mengatasi masalah-masalah perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan (Puskarsa, 2024).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk melakukan analisis tentang kebijakan pembangunan perkotaan (Aswandi & Saudi, 2023) di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Langkah pertama dalam metode ini dengan mengidentifikasi topik dan tujuan penelitian. Peneliti menetapkan fokus yang jelas mengenai aspek penataan kota yang ingin dievaluasi, seperti infrastruktur, penggunaan lahan, atau partisipasi masyarakat.

Setelah menentukan fokus penelitian, langkah kedua yaitu pengumpulan sumber dan

data. Peneliti mencari literatur yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan perkotaan di Tasikmalaya serta studi-studi sebelumnya yang relevan. Sumber-sumber ini dapat mencakup artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi dari organisasi non-pemerintah. Penting untuk memastikan bahwa sumber yang dipilih adalah kredibel dan terkini agar analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang situasi saat ini.

Langkah ketiga yaitu melakukan analisis dan sintesis informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti harus mengevaluasi kualitas dan relevansi setiap sumber serta mengidentifikasi tema-tema utama atau pola-pola yang muncul dari literatur tersebut. Analisis ini juga melibatkan perbandingan antara berbagai kebijakan atau pendekatan yang telah diterapkan di daerah lain dengan kondisi di Kota Tasikmalaya. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang efektivitas kebijakan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Langkah terakhir dalam metode studi literatur yaitu penyusunan laporan penelitian. Dalam laporan ini, peneliti menyajikan temuan-temuan secara sistematis dan jelas, termasuk ringkasan dari literatur yang telah dianalisis serta implikasinya terhadap kebijakan penataan kota di Tasikmalaya. Selain itu, penting untuk mencantumkan referensi lengkap dari semua sumber yang digunakan agar pembaca dapat menelusuri informasi lebih lanjut jika diperlukan. Dengan demikian, metode studi literatur tidak hanya membantu dalam memahami konteks kebijakan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan strategi pembangunan perkotaan yang lebih baik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini melaksanakan penataan kota dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang berkelanjutan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, bersih, dan ramah lingkungan. Salah

satu langkah penting dalam penataan kota adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur penggunaan lahan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penataan perkotaan di Kota Tasikmalaya, khususnya pembangunan semi pedestrian Jalan HZ Mustofa, dan penataan jalan Cihideung telah mengalami kerusakan dan alih fungsi. Kerusakan dan alih fungsi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya masih belum efektif dalam menjaga kualitas infrastruktur dan penataan kota sesuai dengan tujuan awal. Beberapa contoh kerusakan yang terjadi di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa antara lain tiang pembatas jalan yang rusak, bak sampah yang rusak, dan lampu hias yang mati. Kerusakan tiang pembatas jalan diduga disebabkan oleh baut yang lepas, menunjukkan bahwa kebijakan desain dan konstruksi infrastruktur di Kota Tasikmalaya masih belum memperhatikan kualitas bahan. Selain itu, terdapat bak sampah yang rusak di lokasi pedestrian, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemeliharaan infrastruktur di Kota Tasikmalaya masih belum efektif.



Jl. Cihideung (Foto: Detik.com)



Jl. KHZ. Mustofa (Foto: Kabar Priangan.com)

Keberadaan pedestrian berdasarkan data lapangan menunjukkan alih fungsi, dimana banyak pedagang yang menggunakan keberadaannya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak selaras dari tujuan utama dibangunnya pedestrian. Disamping itu beberapa fasilitas terjadi kerusakan seperti tiang besi dan rantainya yang putus sebagai pembatas, serta fasilitas lainnya yang kurang dijaga dengan baik.

Masalah lain terhadap perbaikan seperti mengganti lampu rusak di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menghimpun dana dari para pedagang, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik. Sebagian payung geulis yang hilang dan rusak, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya belum efektif dalam menjaga kualitas estetika.

Rusaknya sejumlah fasilitas kawasan semi Pedestrian Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat termasuk pengunjung. Disamping itu, penggunaan alih fungsi yang telah ditata dengan baik pada jalan Cihideung telah beralih fungsi dengan maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan tersebut.

Dari hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya belum efektif dalam menjaga kualitas infrastruktur, mendukung partisipasi masyarakat, dan mengalokasikan anggaran, sehingga perlu dilakukan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya. Perbaikan kebijakan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas desain dan konstruksi infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan mengalokasikan anggaran yang efektif. Diharapkan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah kerusakan infrastruktur pada semi pedestrian Jalan HZ Mustofa dan penataan kembali Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Cihideung.

Perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kerusakan infrastruktur di lokasi semi pedestrian Jalan HZ

Mustofa, dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Cihideung untuk menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan. Analisis dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi infrastruktur, kebijakan pembangunan perkotaan, dan partisipasi masyarakat. Dari kajian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kerusakan infrastruktur di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa dan penataan kembali bagi PKL dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya untuk mengimplementasikan solusi yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi yang terus-menerus untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kerusakan infrastruktur di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi infrastruktur, kebijakan pembangunan perkotaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kerusakan infrastruktur di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa, disamping penataan kembali Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Cihideung, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya. Perlu dilakukan perbaikan kebijakan yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya dan mengatasi masalah kerusakan infrastruktur di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Cihideung.

Perbaikan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas desain dan konstruksi infrastruktur. Hal ini mencakup penerapan standar teknik yang lebih tinggi dalam pembangunan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya untuk memastikan daya tahan dan

keamanan infrastruktur. Selain itu, pentingnya menggalang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur tidak bisa diabaikan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan warga, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran yang efektif menjadi penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa dana dialokasikan secara tepat untuk proyek prioritas seperti perbaikan semi pedestrian di Jalan HZ Mustofa dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cihideung. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta pedagang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan penataan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya belum efektif, dimana masih terdapat beberapa kerusakan infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya di lokasi semi pedestrian Jalan HZ Mustofa di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kebijakan pembangunan perkotaan di kota tersebut belum efektif dalam menjaga kualitas infrastruktur. Evaluasi kebijakan dalam pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam menjaga kualitas infrastruktur, menggalang partisipasi masyarakat, dan mengalokasikan anggaran. Perbaikan kebijakan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas desain dan konstruksi infrastruktur, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengalokasikan anggaran yang efektif..

#### REFERENSI

Aswandi, K., & Saudi, N. D. (2023). Analisis Pembangunan Perkotaan dalam Perspektif Green Economy (Studi Kasus:

Megaproyek Reklamasi CPI Makassar). *Jurnal Mirai Management, Vol 8 No 2, 2023, 237-247.*

- Bank, W. (2021). Urban Development Overview. Retrieved from World Bank.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development.*
- Costanza, R. d., & Turner, R. K. (2014). Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I. & Turner, R. K. (2014). Changes in the Global Value of Ecosystem Services. *Ecological Economics*, 101, 152-158.
- Duany, A., & Plater-Zyberk, E. (2009). *Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature.* Wiley.
- Fainstein, S. S. (2010). *The Just City.* Cornell University Press.
- Ferreira, A., Sykes, O., & Batey, P. (2009). Planning Theory or Planning Theories? The Hydra Model and its Implications for Planning Education. [https://www.researchgate.net/publication/268395043\\_Planning\\_Theory\\_or\\_Planning\\_Theories\\_The\\_Hydra\\_Model](https://www.researchgate.net/publication/268395043_Planning_Theory_or_Planning_Theories_The_Hydra_Model).
- Gunawan Undang (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan.* Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari.
- Haghani, M., & dkk. (2023). The landscape and evolution of urban planning science.
- Hidayati, D., Rahmaniar, R., & Supriyadi, A. (2023). Green Spaces Impact on Urban Health: Evidence from Indonesian Cities. *Environmental Science & Policy*, 135(1), 45-56.I
- Ine Mariane, Ajeng Setia Prasasti (2023). *Evaluasi Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung (Studi: Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang RT RW Kota Bandung Tahun 2011-2031).* Jurnal Administrasi Publik Volume 5, Nomor 1.
- Indonesia, P. (2024). *Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota: Upaya Menjembatani*

- Kesenjangan Geografis. *PuskoMedia Indonesia*, retrieved from : <https://www.puskomedia.id/blog/usaha-pemerataan-pembangunan-di-desa-dan-kota-geografi/>.
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The Impact of Gender Inequality on Economic Growth: A Review of the Evidence. *World Development*, 37(5), 881-891.
- Lehmann, S. (2023). Research Methods in Urban Design: A Framework for Researching the Performance and Resilience of Places. <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/6/1548>.
- Milojevic, B. (2018). Integrated Urban Planning In Theory And Practice. [https://www.researchgate.net/publication/325714737\\_Integrated\\_Urban\\_Planning\\_In\\_Theory\\_And\\_Practice](https://www.researchgate.net/publication/325714737_Integrated_Urban_Planning_In_Theory_And_Practice).
- Modeong, I., Sunarno, & ND, M. F. (2024). Prioritas Lingkungan dalam Model Bisnis Alternatif: Pendekatan Hukum dan Doughnut Economy. *Media Juris*, Vol 7 No 2, 2024, 267/298.
- MZ, L., Wibowo, M. R., & Said, B. F. (2024). *Teknik Sipil Untuk Infrastruktur Perkotaan. Desain Dan Manajemen*. ISBN: 978-623-8702-93-0. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Perwalkot, K. T. (2024). Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- Puskarsa. (2024). Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Perkotaan. *Pusat Peningkatan Karir Sdm Dan Kerjasama, Puskarsa Universitas Medan Area*.
- S, A., Elrahman, A., & Asaad, M. (2021). *Urban design & urban planning: A critical analysis to the theoretical relationship gap*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447920301088>.
- Sari, R., et al. (2021). "The Role of Street Vendors in Urban Economy: A Case Study." *Journal of Urban Management*.
- Sari, R., Prasetyo, L., & Wibowo, A. (2022). Inclusive Urban Planning: Engaging Marginalized Communities in Indonesia. *Journal of Urban Planning*, 15(2), 123-140.
- Sen, A. K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Sri Sulastris, dkk. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Mediasosian*, Vol. 6, No. 2.
- Tampubolon, M. P. (2020). *CHANGE MANAGEMENT : Manajemen Perubahan; Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media
- Zenal Arifin, dkk. (2023). Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. *Ijoehm*, Vol.3. No.4..